KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

4CZCTIYG

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1721-B1

			FINAL/TIDAK FINAL			1721-01	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 2 9 0			H.4 X	Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke-	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final	
_							
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 8 9 4 8 5 8 0 5 9 7 2 7 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : YOSEP ARIMATIA							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	7.990.000	7.990.000	0	5	399.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy						2 0 2 2 <i>уууу</i>	
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mmyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
	nsi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi : C.4 Tanggal .		0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penar	: ndatangan	RIANDY	2 0 2 2 yyyy				
C.6 Pernyataan	•						
		tandatangani secara elektronik.			g		
			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.				